



Mengelola Urbanisasi Untuk Menciptakan Pembangunan Kota Yang Berkesinambungan

Jakarta, 19 Desember 2017 - Fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat. Pada kuartal III tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,06 persen, pertumbuhan yang stabil ini tercipta di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum pulih. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi Pemerintah juga meningkat, diikuti oleh ekspor dan impor yang tumbuh signifikan.

Indonesia konsisten dalam menjalankan agenda reformasi. Transformasi struktural dan diversifikasi ekonomi terus diperkuat untuk menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kuat, terutama dengan mempertimbangkan kondisi global. Pada gilirannya, hal ini dapat membantu mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dua isu utama yang masih dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan lain adalah urbanisasi. Di Indonesia urbanisasi tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan negara-negara Asia lain, bahkan jika dibandingkan dengan Tiongkok dan India, dua raksasa Asia dengan penduduk terpadat di dunia.

Bila dikelola dengan tepat, urbanisasi dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran Pemerintah yang lebih tinggi. Dampak lanjutannya akan menopang pertumbuhan ekonomi. Pada saat bersamaan, Pemerintah berupaya untuk mengatasi potensi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh urbanisasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk setiap kenaikan 1 persen penduduk perkotaannya, Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4 persen. Hal ini disebabkan oleh kemacetan, polusi, dan risiko bencana akibat tidak memadainya investasi infrastruktur. Indonesia harus menuai keuntungan penuh dari urbanisasi.

Mengelola urbanisasi yang tepat menyangkut upaya bukan saja untuk mengakomodasi urbanisasi melalui pembangunan fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan air bersih namun juga upaya untuk memberdayakan pendatang melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih jauh pengelolaan urbanisasi tidak dapat lepas dari upaya pemerintah dalam membangun daerah pinggiran mengingat pembangunan daerah pinggiran diharapkan akan berdampak pada penciptaan sentra-sentra ekonomi baru yang akan membantu pemerataan sumber daya manusia sumber-sumber daya pembangunan lainnya.

Pembangunan wilayah perkotaan baru di daerah pinggiran ini perlu pula berpedoman pada local wisdom dimana unsur keunikan sumber daya alam dan budaya daerah dipertahankan dalam rangka menciptakan daya tarik bagi pengembangan daerah tersebut sebagai sentra ekonomi baru.

Berangkat dari pemikiran ini, kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperoleh manfaat optimal dari urbanisasi di Indonesia antara lain memprioritaskan isu urbanisasi dalam agenda pembangunan nasional, memperkuat koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah daerah dan masyarakat, mengurangi ketidakseimbangan antardaerah, meningkatkan kapasitas manajerial pemerintah daerah, dan melanjutkan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di bidang infrastruktur.


1/2

Mengingat pentingnya pengelolaan isu urbanisasi di Indonesia, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar on Urbanization "Managing Urbanization for Sustainable Cities" di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 18-20 Desember 2017. Seminar ini membahas pengelolaan isu-isu urbanisasi serta masalah dalam lingkungan perkotaan. Pembahasan difokuskan pada pendekatan inovatif pemerintah daerah dalam mengelola urbanisasi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penataan sistem transportasi perkotaan, pengelolaan masalah sampah/limbah, pemanfaatan potensi-potensi sektor unggulan, dan pemanfaatan investasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Acara ini merupakan bagian dari Voyage to Indonesia, serangkaian program yang dilakukan menjelang Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2018 yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober tahun depan. Hasil dari seminar ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan global pada Pertemuan Tahunan 2018 sebagai bagian dari program Voyage to Indonesia. Dalam program ini, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan tersebut. Secara lebih luas, program ini juga bertujuan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang reformis, tangguh, progresif, dan dinamis.

Informasi lebih lanjut :

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Gedung RM. Notohamiprodjo Lt.5
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta
Telp. (021) 34831674

 2/2 